E-ISSN: 3025-0994
Halaman 5241-5249
Volume 4 Nomor 4 Tahun 2026

Dari Kuratif Ke Preventif: Analisis Perubahan Kurikulum 2013 Ke Kurikulum Merdeka dan Pengaruhnya Terhadap Kebijakan Pelayanan BK di SMKN 1 Batang

Mifta Ayu Fadillah[1] , Sabila Faiza Al Izzati Amin[2], Eka Yunita[3], M. Wildan Ahfadh[4], Muhammad Syafi Hifdzi Haq[5], Muhammad Mufid[6]

[1,2,3,4,5,6] Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia
e-mail: mifta.ayu.fadillah24124@mhs.uingusdur.ac.id, sabila.faiza.al.izzati.amin24154@mhs.uingusdur.ac.id, eka.yunita2431@mhs.uingusdur.ac.id , m.wildan.ahfadh24152@mhs.uingusdur.ac.id , muhammad.syafi'.hifdzi.haq24161@mhs.uingusdur.ac.id , m.mufid@uingusdur.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis perubahan Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka dan pengaruhnya terhadap kebijakan pelayanan Bimbingan dan Konseling (BK) di SMKN 1 Batang, khususnya dalam menjawab kebutuhan pengembangan karier serta kesiapan kerja peserta didik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif studi kasus untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai dinamika perubahan kebijakan di tingkat satuan pendidikan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan seorang guru BK yang dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan aktifnya dalam masa transisi kurikulum, lalu dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara interaktif dan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan BK bergeser dari pendekatan kuratif menuju preventif dan developmental: layanan diberikan kepada seluruh siswa secara merata melalui layanan dasar maupun peminatan, dirancang berdasarkan asesmen kebutuhan peserta didik di awal tahun ajaran, dan dijalankan secara kolaboratif bersama wali kelas dan orang tua, sementara fungsi kuratif tetap berjalan melalui konseling individual maupun kelompok bagi siswa yang memerlukan penanganan khusus. Stigma terhadap ruang BK yang kerap dipersepsikan hanya bagi siswa bermasalah dan kebutuhan peningkatan kompetensi guru BK dalam menyusun perangkat layanan yang fleksibel masih menjadi tantangan. Penelitian ini berimplikasi pada kebijakan dan praktik pendidikan, yaitu perlunya penyesuaian kebijakan layanan BK yang selaras dengan struktur Kurikulum Merdeka, penguatan kompetensi guru BK melalui pelatihan berkelanjutan, serta sosialisasi paradigma BK kepada seluruh warga sekolah agar tercipta iklim layanan yang inklusif. Penelitian ini berkontribusi dengan memberi gambaran empiris tentang pergeseran kebijakan layanan BK dari kuratif ke preventif di sekolah kejuruan, konteks yang masih jarang dikaji.

E-ISSN: 3025-0994
Halaman 5241-5249
Volume 4 Nomor 4 Tahun 2026

Kata Kunci: Bimbingan Dan Konseling, Kebijakan Pendidikan, Kurikulum 2013, Kurikulum Merdeka, Layanan Preventif

Abstract

This study aims to analyze the transition from the 2013 Curriculum to the Merdeka Curriculum and its impact on Guidance and Counseling (GC) service policies at SMKN 1 Batang, particularly in addressing students' career development and work readiness needs. This research employs a qualitative approach with a descriptive case study design to gain an in-depth understanding of the dynamics of policy changes at the educational unit level. Data were collected through in-depth interviews with a guidance counselor selected purposively based on their active involvement during the curriculum transition period, and subsequently analyzed through interactive and continuous data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that GC services have shifted from a curative approach toward preventive and developmental paradigms: services are provided equitably to all students through basic and specialization services, designed based on student needs assessments conducted at the beginning of the academic year, and implemented collaboratively with homeroom teachers and parents, while curative functions remain active through individual and group counseling for students requiring specialized intervention. The stigma surrounding the counseling room, which is often perceived as exclusively for troubled students, alongside the need to enhance counselors' competencies in developing flexible service instruments, remain key challenges. This study implies the necessity for educational policy and practice reforms, specifically aligning GC service policies with the Merdeka Curriculum structure, strengthening counselor competencies through continuous professional development, and socializing the updated GC paradigm to the entire school community to foster an inclusive service climate. Furthermore, this study contributes by providing an empirical overview of the policy shift in GC services from curative to preventive within a vocational high school setting, a context that remains rarely explored.

Keywords : Educational Policy, Guidance and Counseling, Merdeka Curriculum, Preventive Services, 2013 Curriculum

LATAR BELAKANG

Di era globalisasi dan inovasi disruptif, perkembangan teknologi digital yang pesat turut memengaruhi cara sekolah membina karakter peserta didik (Kusumaningsih et al., 2025). (Mashuri et al., 2024) juga menegaskan bahwa pendidikan perlu terus beradaptasi dengan perubahan sosial, termasuk melalui penyesuaian kurikulum, metode pembelajaran, dan kebijakan pendidikan, agar tetap relevan dengan kebutuhan zaman. Dalam konteks ini, kurikulum menjadi instrumen utama yang menentukan arah dan kualitas proses pendidikan. Kurikulum 2013 disusun untuk mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara seimbang (Machali, 2014). Namun, kebutuhan peserta didik yang semakin beragam serta tuntutan pembelajaran yang lebih fleksibel mendorong lahirnya Kurikulum Merdeka.

Kurikulum ini menekankan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, memberi ruang eksplorasi yang lebih luas, serta memperkuat karakter melalui Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (Haidah et al., 2026). Perubahan tersebut tidak hanya berdampak pada proses pembelajaran di kelas, tetapi juga pada layanan pendukung pendidikan, termasuk layanan Bimbingan dan Konseling (BK); transisi kurikulum diketahui masih menimbulkan kendala dalam pelaksanaan layanan BK, bahkan di tingkat perguruan tinggi (Sugiarti, 2023).

Secara lebih spesifik, layanan BK di sekolah berperan membantu peserta didik mengatasi permasalahan pribadi, sosial, belajar, dan karier. Pada praktik yang dikaitkan dengan Kurikulum 2013, layanan BK cenderung berorientasi kuratif, yaitu menangani masalah yang sudah terjadi pada siswa. Pendekatan ini membuat layanan BK bersifat reaktif dan kurang optimal dalam mencegah munculnya masalah baru. Sementara itu, Kurikulum Merdeka mendorong perubahan paradigma layanan BK menjadi lebih preventif dan *developmental*, yakni berfokus pada pencegahan masalah dan pengembangan potensi siswa sejak dini. Pendekatan ini menuntut integrasi yang lebih kuat antara layanan BK dan kegiatan pembelajaran, serta kolaborasi yang lebih intens antara guru BK, guru mata pelajaran, dan pihak sekolah lainnya. Dengan demikian, guru BK tidak hanya berperan sebagai penyelesai masalah (*problem solver*), tetapi juga sebagai fasilitator perkembangan peserta didik secara holistik, termasuk dalam merancang layanan penguatan karakter (Cahyono, 2022).

Meskipun secara konseptual perubahan ini dianggap progresif, pemahaman tentang bagaimana pergeseran dari kuratif ke preventif berlangsung di lapangan masih terbatas, khususnya dalam konteks kebijakan pelayanan BK di sekolah menengah kejuruan. Kajian-kajian sebelumnya telah membahas manajemen layanan BK dalam Kurikulum Merdeka dan program bimbingan karier di SMK , tetapi sejauh penelusuran penulis, belum ada kajian yang secara khusus menelaah bagaimana perubahan dari Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka memengaruhi arah kebijakan dan praktik pelayanan BK di satu sekolah kejuruan tertentu. Kesenjangan ini penting dikaji karena keberhasilan implementasi kurikulum tidak hanya ditentukan oleh pembelajaran di kelas, tetapi juga oleh efektivitas layanan pendukung seperti BK. Pentingnya penelusuran ini juga tampak pada kajian kurikulum pendidikan agama Islam di perguruan tinggi yang menemukan disparitas antara kebijakan kelembagaan dan praktik pedagogis (Mufid et al., 2026).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis perubahan dari Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka serta pengaruhnya terhadap kebijakan pelayanan BK di SMKN 1 Batang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan wawancara terhadap guru BK sebagai informan. Penelitian ini diharapkan memberi gambaran empiris tentang pergeseran orientasi layanan BK, sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi sekolah dalam menyesuaikan kebijakan, meningkatkan kompetensi guru BK, dan memperkuat kolaborasi antarpemangku kepentingan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam perubahan layanan Bimbingan dan Konseling dari pendekatan kuratif menuju preventif dan *developmental* dalam konteks implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah. Fokus penelitian diarahkan pada pengalaman

reflektif guru BK dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi layanan BK, khususnya setelah perubahan kurikulum dari Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka.

Subjek penelitian adalah seorang guru Bimbingan dan Konseling di SMKN 1 Batang yang telah berpengalaman sebagai guru BK selama tujuh tahun. Informan berlatar pendidikan S1 Bimbingan dan Konseling serta Pendidikan Profesi Guru Bimbingan dan Konseling. Informan dipilih secara *purposive* karena dinilai memiliki pengalaman langsung dalam pelaksanaan layanan BK di sekolah serta memahami dinamika perubahan layanan BK dalam konteks kebijakan sekolah.

Data dikumpulkan melalui wawancara yang disusun berdasarkan empat aspek utama, yaitu pemahaman dan paradigma BK, pengalaman implementasi layanan BK, tantangan di lapangan, serta pengembangan dan harapan terhadap layanan BK. Pertanyaan wawancara mencakup layanan dasar, layanan responsif, layanan perencanaan individual, dan layanan dukungan sistem. Melalui wawancara tersebut, peneliti memperoleh data tentang bagaimana guru BK memahami perubahan paradigma BK, bagaimana layanan dirancang berdasarkan kebutuhan siswa, serta bagaimana kolaborasi dilakukan dengan pihak sekolah dan orang tua. Data dianalisis secara deskriptif melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data berdasarkan tema layanan, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, menurut informan, perubahan dari Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka memengaruhi cara guru BK memahami dan melaksanakan layanan BK di sekolah. Berdasarkan hasil wawancara, guru BK memahami bahwa fungsi BK saat ini tidak sebatas menangani siswa yang bermasalah, tetapi juga membantu dan memfasilitasi kebutuhan siswa dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karier agar perkembangan peserta didik berlangsung optimal.

Temuan pertama menunjukkan adanya perubahan paradigma layanan BK dari kuratif menuju preventif dan *developmental*. Informan menyatakan bahwa BK tidak lagi hanya berfokus pada siswa bermasalah, tetapi diberikan kepada seluruh siswa, baik yang sedang mengalami masalah maupun yang membutuhkan bimbingan untuk pengembangan diri. Hal ini menunjukkan bahwa layanan BK di SMKN 1 Batang mulai diarahkan pada upaya pencegahan masalah dan pengembangan potensi siswa secara menyeluruh.

Perubahan Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka dipersepsikan membawa perubahan penting pada orientasi layanan BK di SMKN 1 Batang. Pada masa Kurikulum 2013, yang menekankan keseimbangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan (Machali, 2014), layanan BK menurut informan sering dipersepsikan sebagai layanan bagi siswa bermasalah. Pola ini menunjukkan kecenderungan pendekatan kuratif, yaitu layanan diberikan setelah masalah muncul. Dalam implementasi Kurikulum Merdeka, layanan BK mulai diarahkan menjadi lebih preventif dan *developmental*. Temuan ini sejalan dengan (Sugiarti, 2023), yang menunjukkan bahwa transisi kurikulum membawa konsekuensi bagi pelayanan BK.

Perubahan tersebut tampak dari pemahaman guru BK bahwa layanan BK diberikan kepada seluruh peserta didik, bukan hanya kepada siswa yang mengalami masalah. Pandangan ini sejalan dengan semangat Kurikulum Merdeka yang menempatkan peserta didik sebagai pusat pembelajaran (Haidah et al., 2026). Dalam konteks ini, guru BK berperan

sebagai fasilitator perkembangan peserta didik pada aspek pribadi, sosial, belajar, dan karier, serta dituntut berinovasi dalam merancang layanan, termasuk layanan yang mendukung penguatan karakter (Cahyono, 2022).

Layanan Dasar Berbasis Asesmen Kebutuhan

Temuan kedua berkaitan dengan pelaksanaan layanan dasar. Guru BK merancang layanan dasar dengan melakukan asesmen kebutuhan (*need assessment*), mengolah data, lalu menentukan materi layanan yang sesuai dengan hasil asesmen. Materi yang sering diberikan berkaitan dengan bidang pribadi, sosial, belajar, dan karier. Respons siswa terhadap layanan dasar dinilai positif karena siswa menunjukkan antusiasme selama mengikuti layanan. Hal ini menunjukkan bahwa layanan BK mulai disusun berdasarkan kebutuhan nyata peserta didik, bukan hanya berdasarkan program rutin tahunan.

Layanan dasar yang dilakukan melalui *need assessment* menunjukkan pergeseran dari layanan yang bersifat umum menjadi layanan berbasis kebutuhan siswa. Guru BK tidak langsung menentukan materi layanan, tetapi terlebih dahulu mengidentifikasi kebutuhan peserta didik, mengolah datanya, lalu menyusun materi yang sesuai. Praktik ini mencerminkan prinsip layanan BK preventif karena guru BK berupaya memahami kondisi siswa sejak awal agar potensi masalah dapat dicegah. (Lubis et al., 2024) juga menekankan bahwa instrumen asesmen seperti RIASEC dapat membantu konselor mengidentifikasi kebutuhan peserta didik dalam kerangka Kurikulum Merdeka, selama hasilnya dipadukan dengan data pendukung lain seperti kepribadian dan preferensi siswa.

Layanan Responsif

Temuan ketiga berkaitan dengan layanan responsif. Dalam menangani kasus siswa, misalnya kasus pencurian yang dilakukan salah seorang siswa, guru BK tetap menjalankan fungsi kuratif. Namun, pendekatan yang digunakan tidak semata-mata menghukum, melainkan melalui proses konseling. Informan menyebutkan bahwa pendekatan yang sering digunakan adalah *Cognitive Behavior Therapy*. Kesulitan terbesar dalam layanan responsif muncul ketika siswa tidak kooperatif. Meskipun demikian, guru BK tetap menjaga profesionalitas dan kerahasiaan layanan dengan berpegang pada kode etik profesi.

Dalam layanan responsif, pendekatan kuratif masih tetap dibutuhkan, terutama ketika siswa mengalami masalah tertentu. Namun, layanan responsif tidak lagi dipahami sebagai bentuk hukuman. Penggunaan pendekatan *Cognitive Behavior Therapy* menunjukkan bahwa guru BK berusaha membantu siswa memahami pola pikir dan perilaku yang perlu diubah. Dengan demikian, meskipun layanan responsif menangani masalah yang sudah terjadi, prosesnya tetap diarahkan pada perubahan perilaku dan pengembangan diri siswa. Hal ini menunjukkan bahwa pergeseran ke arah preventif tidak menghapus fungsi kuratif, melainkan menempatkannya sebagai bagian dari layanan yang lebih komprehensif.

Layanan Perencanaan Individual dan Bimbingan Karier

Temuan keempat berkaitan dengan layanan perencanaan individual. Guru BK membantu siswa merencanakan masa depan melalui bimbingan karier, baik dalam bentuk bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, konseling kelompok, maupun konseling individu. Guru BK juga menggunakan berbagai asesmen yang disesuaikan dengan jenjang kelas X, XI, dan XII, seperti tes gaya belajar, MBTI, DISC, *multiple intelligence*, dan RIASEC. Namun,

kendala yang ditemukan adalah sebagian besar siswa belum mengenal dirinya, belum memahami bakat dan minatnya, serta belum memiliki rencana masa depan yang matang.

Layanan perencanaan individual juga menjadi bagian penting dalam perubahan kebijakan layanan BK. Dalam Kurikulum Merdeka, peserta didik didorong untuk mengenali potensi, minat, dan arah masa depannya, yang tampak dari penggunaan berbagai asesmen seperti tes gaya belajar, MBTI, DISC, *multiple intelligence*, dan RIASEC. Penggunaan asesmen tersebut membantu guru BK memberikan layanan yang lebih terarah. Dalam konteks SMK, layanan perencanaan karier menjadi sangat penting karena siswa dipersiapkan memasuki dunia kerja, melanjutkan pendidikan, atau mengembangkan keterampilan sesuai bidang keahliannya. Temuan serupa dilaporkan (Wicaksono et al., 2024), di SMKN 3 Madiun, yaitu bahwa program bimbingan karier dalam Kurikulum Merdeka Belajar membantu siswa memahami bakat dan minatnya serta menentukan pilihan studi lanjut atau pekerjaan.

Kendala yang muncul dalam layanan perencanaan karier adalah banyak siswa belum mengenal dirinya sendiri. Mereka belum memahami bakat, minat, dan rencana masa depan secara matang. Kondisi ini menunjukkan bahwa layanan BK preventif sangat dibutuhkan. Guru BK perlu memberikan pendampingan sejak awal agar siswa mampu membuat keputusan karier secara lebih sadar dan bertanggung jawab. Dengan demikian, layanan BK tidak hanya menyelesaikan masalah saat siswa mengalami kebingungan, tetapi juga mencegah kebingungan karier melalui bimbingan yang terencana.

Layanan Dukungan Sistem

Temuan kelima berkaitan dengan layanan dukungan sistem. Guru BK berkolaborasi dengan wali kelas, kesiswaan, STP2K, kepala sekolah, dan orang tua ketika terdapat kasus yang membutuhkan kerja sama. Sekolah juga memberikan dukungan yang baik terhadap program BK, dan guru BK terlibat dalam penyusunan program tahunan bimbingan dan konseling sehingga layanan BK menjadi bagian dari kebijakan sekolah. Hal ini memperlihatkan bahwa layanan BK di SMKN 1 Batang berjalan secara lebih kolaboratif dan sistematis.

Dukungan sistem menjadi faktor penting dalam keberhasilan layanan BK. Kolaborasi guru BK dengan wali kelas, kesiswaan, STP2K, kepala sekolah, dan orang tua menunjukkan bahwa layanan BK tidak dapat berjalan sendiri. Guru BK membutuhkan informasi dari guru mata pelajaran dan wali kelas untuk memahami perkembangan akademik dan perilaku siswa, sementara orang tua perlu dilibatkan agar pendampingan berlangsung berkelanjutan. Keterlibatan guru BK dalam penyusunan program tahunan juga menunjukkan bahwa layanan BK telah menjadi bagian dari kebijakan sekolah. Hal ini sejalan dengan (Arsyad et al., 2026) yang menyimpulkan bahwa implementasi layanan BK dalam Kurikulum Merdeka memerlukan manajemen sekolah yang terbuka, kebijakan yang mendukung, dan kepemimpinan yang kolaboratif.

Tantangan: Stigma dan Kompetensi Guru BK

Selain itu, penelitian menemukan sejumlah tantangan. Tantangan utama adalah masih adanya stigma bahwa siswa yang datang ke ruang BK atau dipanggil guru BK merupakan siswa bermasalah, sehingga layanan BK belum sepenuhnya dipahami sebagai ruang pengembangan diri. Guru BK juga menilai bahwa peningkatan kompetensi profesional sangat penting agar mampu beradaptasi dengan tuntutan zaman. Upaya yang dilakukan adalah

mengikuti berbagai pelatihan dan aktif dalam komunitas profesional seperti Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK).

Meskipun layanan BK telah berkembang, stigma terhadap BK masih menjadi tantangan. Masih ada anggapan bahwa siswa yang datang ke ruang BK adalah siswa bermasalah. (Azzahra & Nurmawati, 2025), menemukan bahwa sebagian siswa mengaitkan ruang BK dengan hukuman dan cenderung baru mencari bantuan ketika dipanggil atau merasa sangat terbebani, sedangkan (Arsyad et al., 2026) mencatat stigma sebagai salah satu hambatan integrasi layanan BK dalam manajemen sekolah. Stigma ini dapat menghambat siswa memanfaatkan layanan BK secara sukarela. Oleh karena itu, perubahan paradigma BK tidak hanya perlu dilakukan oleh guru BK, tetapi juga dipahami oleh seluruh warga sekolah. Sekolah perlu membangun budaya bahwa ruang BK adalah ruang aman bagi siswa untuk berkonsultasi, merencanakan masa depan, dan mengembangkan diri.

Peningkatan kompetensi guru BK juga menjadi kebutuhan penting. Informan menyatakan bahwa guru BK perlu mengikuti pelatihan dan aktif dalam komunitas profesional seperti MGBK. Keterbatasan pelatihan juga dicatat sebagai hambatan oleh (Arsyad et al., 2026), dan kebutuhan ini sejalan dengan pandangan bahwa pendidikan harus terus beradaptasi dengan perubahan social (Machali, 2014). Guru BK perlu memahami perkembangan peserta didik, teknik asesmen, strategi konseling, layanan karier, serta pendekatan konseling yang sesuai dengan kebutuhan zaman agar layanan BK dapat berjalan maksimal sesuai tuntutan Kurikulum Merdeka.

Sintesis Temuan

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka dipersepsikan berpengaruh terhadap kebijakan dan praktik layanan BK di SMKN 1 Batang. Layanan BK mulai bergerak dari pola kuratif menuju pola preventif, *developmental*, berbasis asesmen, dan kolaboratif. Perubahan ini memperkuat peran guru BK sebagai pendamping perkembangan siswa, bukan hanya sebagai penangan masalah. Hal ini sejalan dengan (Mufid et al., 2026) yang menegaskan bahwa keberhasilan restrukturisasi kurikulum menuntut keselarasan tata kelola dan kebijakan kelembagaan. Mengingat data bersumber dari satu informan, interpretasi ini perlu dibaca sebagai gambaran kontekstual, bukan generalisasi.

SIMPULAN

Berdasarkan wawancara dengan seorang guru BK, perubahan dari Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka di SMKN 1 Batang dipersepsikan membawa pergeseran layanan BK dari pola kuratif menuju pola preventif dan *developmental*. Pergeseran ini tampak pada layanan dasar berbasis asesmen kebutuhan, layanan perencanaan individual yang memanfaatkan beragam asesmen, serta dukungan sistem yang kolaboratif. Fungsi kuratif tidak hilang, tetapi dijalankan melalui proses konseling. Stigma terhadap ruang BK dan kebutuhan peningkatan kompetensi guru BK masih menjadi tantangan utama. Penelitian ini memberi gambaran empiris tentang perubahan orientasi layanan BK di sekolah kejuruan. Temuan bersifat kontekstual dan tidak dapat digeneralisasi karena hanya bersumber dari satu informan di satu sekolah serta belum ditriangulasi dengan observasi, dokumen kebijakan, atau perspektif siswa.

SARAN

Sekolah disarankan merumuskan kebijakan layanan BK secara tertulis dan terintegrasi dengan program sekolah, serta mensosialisasikan paradigma BK kepada seluruh warga sekolah untuk mengurangi stigma. Guru BK disarankan terus meningkatkan kompetensi melalui pelatihan dan komunitas profesional seperti MGBK. Penelitian selanjutnya disarankan melibatkan lebih banyak informan (siswa, wali kelas, dan kepala sekolah), menelaah dokumen kebijakan, serta membandingkan beberapa SMK agar gambaran perubahan kebijakan layanan BK lebih komprehensif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada guru Bimbingan dan Konseling SMKN 1 Batang yang bersedia menjadi informan dan berbagi pengalaman, serta kepada pihak sekolah yang telah memberikan izin dan kesempatan selama proses penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Arsyad, M., Suriansyah, A., & Sulistiyana. (2026). Implementasi Layanan Bimbingan Dan Konseling Dalam Kurikulum Merdeka: Perspektif Manajemen Pendidikan Di Sekolah Menengah. *Jamp: Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan*. Https://Journal2.Um.Ac.Id/Index.Php/Jamp/Article/View/62157

Azzahra, S. N., & Nurmawati. (2025). Persepsi Siswa Terhadap Guru Bimbingan Dan Konseling Dalam Pelaksanaan Layanan Konseling Individu Di Man 6 Jakarta. *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*.

Cahyono, T. (2022). Manajemen Layanan Bimbingan Dan Konseling Dalam Kurikulum Merdeka Belajar. *Bisma The Journal Of Konseling*. Https://Api.Semanticscholar.Org/Corpusid:260049572

Haidah, M., Rohiyatun, B., & Najwa, L. (2026). Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka Dalammeningkatkan Kompetensi Peserta Didik. *Educational : Jurnal Inovasi Pendidikan & Pengajaran*.

Kusumaningsih, M., Nugroho, D. A., Syaifuddin, M., & Tarifin, A. (2025). Perkembangan Media Flipbook Digital Dalam Peningkatan Karakter Religi Siswa. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*. Https://Api.Semanticscholar.Org/Corpusid:277843660

Lubis, M. A., Harahap, N. H., Rahmayanty, D., Zulfikar, M., Zubaidah, Yulianti, Sarman, F., & Ferdiansyah, M. (2024). Need Assessment Peserta Didik Dalam Bingkai Kurikulum Merdeka Belajar. *G-Couns: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, *8*(3).

Machali, I. (2014). *Kebijakan Perubahan Kurikulum2013 Dalam Menyongsongindonesia Emas Tahun 2045*. Https://Api.Semanticscholar.Org/Corpusid:117189120

Mashuri, Jailani, M., & Isma, A. (2024). Perubahan Sosial Dan Pendidikan. *Dirasah : Jurnal Studi Ilmu Dan Manajemen Pendidikan Islam*. Https://Api.Semanticscholar.Org/Corpusid:274254652

Mufid, M., Muhlisin, Jaeni, M., & Huda, M. (2026). Integrating Global Citizenship Education (Gced) Into Higher Education Islamic Curriculum As An Effort To Reconstruct Global Muslim Identity. *Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam Dan Multikulturalisme*.

Sugiarti, T. (2023). Transisi Kurikulum Di Indonesi Berakibat Bagi Pelayanan Bimbingan Dan

Konseling Dalam Pelayanan Mahasiswa Di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. *Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan*. Https://Api.Semanticscholar.Org/Corpusid:258964560

Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Komunikasi (Kuantitatif, Kualitatif, Dan Cara Mudah Menulis Artikel Pada Jurnal Internasional Bereputasi). Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D Dan Penelitian Pendidikan). Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Wicaksono, A. Y., Trisnani, R. P., & Sari, Q. K. A. (2024). Implementasi Program Bimbingan Karir Dalam Kurikulum Merdeka Belajar Di Smkn 3 Madiun. *Muria Research Guidance And Counselling Journal*, *3*(2). Https://Doi.Org/10.24176/Mrgc.V3i2.13809